Penerapan Regulasi Hukum Terhadap Kasus Pungutan Liar oleh Penyelenggara Parkir Ilegal di Kota Surabaya

Muhimmatur Rohmah, Agus Machfud Fauzi

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

E-mail : muhimmatur.23342@mhs.unesa.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i2.21957>

Abstrak

Pertambahan penduduk di Indonesia mempengaruhi jumlah transportasi pribadi yang dimiliki masyarakat di Indonesia. Kecenderungan masyarakat Indonesia memilih menggunakan transportasi pribadi yang menyebabkan semakin menumpuknya kendaraan di Indonesia. Tentunya, jika kepemilikan transportasi bertambah kebutuhan akan lahan parkir juga semakin bertambah. Di kota-kota besar, contohnya Kota Surabaya, permasalahan parkir sudah marak terjadi bahkan tumbuh subur. Oknum-oknum nakal yang mengambil keuntungan dari penyediaan lahan parkir banyak bermunculan, utamanya pada tempat-tempat perdagangan dan juga tempat wisata. Di Kota Surabaya sebenarnya telah diterbitkan peraturan mengenai penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya, yaitu Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018. Namun, dalam penerapannya masih belum berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Penelitian ini memiliki tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat dan pemerintah agar lebih bijak dalam menganggapi masalah pungutan liar oleh penyelenggara parkir ilegal dan supaya terwujudnya lingkungan kota yang lebih baik dan juga tertata. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dan dengan menggunakan data yang bersumber dari studi literatur. Pada penelitian ini juga menggunakan teori interaksi simbolik serta teori structural fungsional. Kedua teori tersebut digunakan untuk mengkaji bagaimana regulasi hukum tersebut dapat mempengaruhi perilaku, norma, dan hubungan antar individu di masyarakat. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap parkir ilegal dan regulasi hukum yang diterapkan masih pro dan kontra. Beberapa masyarakat menganggap bahwa parkir ilegal masih menjadi hal wajar, namun bagi sebagian orang juga menilai bahwa parkir ilegal cukup meresahkan. Implementasi regulasi hukum yang kurang maksimal juga mendorong menjamurnya parkir ilegal pada Kelurahan Ketintang, Kota Surabaya.

Kata kunci: Parkir; ilegal; pungutan liar; peraturan

Abstract

Population growth in Indonesia affects the number of private transportation owned by people in Indonesia. The tendency of Indonesian people to choose to use private transportation is what causes the increasing number of vehicles in Indonesia. Of course, if transportation ownership increases, the need for parking lots will also increase. In big cities, for example Surabaya, parking problems have been rampant and even flourished. Unscrupulous individuals who take advantage of the provision of parking lots have emerged, especially in places of commerce and also tourist attractions. In Surabaya City, regulations have actually been issued regarding the implementation of parking in Surabaya City, namely Surabaya City Regulation No. 3 of 2018. However, in its implementation it has not yet been implemented in accordance with existing regulations. This study aims to provide benefits to the community and government to be wiser in responding to the problem of extortion by illegal parking organizers and to create a better and more orderly city environment. Qualitative research methods are used in this study and using data sourced from literature studies. This study also uses symbolic interaction theory and structural functional theory. Both theories are used to examine how legal regulations can influence behavior, norms, and relationships between individuals in society. The results of this study explain that public perception of illegal parking and the legal regulations applied are still pros and cons. Some people consider illegal parking to be normal, but some people also consider illegal parking to be quite disturbing. The less than optimal implementation of legal regulations also encourages the proliferation of illegal parking in Ketintang Village, Surabaya City

Keywords: parking, illegal, extortion, regulation

I. Pendahuluan

Kota Surabaya dari tahun ke tahun semakin mengalami kepadatan penduduk, hal tersebut diperkirakan karena angka kelahiran yang tinggi dan jumlah perantau ke Kota Surabaya yang juga semakin

banyak. Jumlah penduduk yang sangat banyak tersebut tentunya mempengaruhi mobilitas masyarakat. Mobilitas yang tinggi di masyarakat dapat disebabkan oleh faktor pekerjaan, yaitu banyaknya masyarakat yang bekerja atau mengenyam pendidikan di luar daerah domisilinya.¹ Misalnya saja, banyak masyarakat dari Sidoarjo maupun kota-kota lain di sekitar Kota Surabaya namun bekerja di Surabaya. Selain itu, banyaknya mahasiswa rantau yang berkuliah di Surabaya juga menyebabkan padatnya mobilitas masyarakat di Surabaya. Kepadatan mobilitas tersebut akhirnya mempengaruhi penggunaan transportasi di masyarakat yang digunakan untuk menunjang aktivitasnya.

Selain itu, karena kecenderungan masyarakat yang memilih menggunakan transportasi pribadi daripada transportasi umum membuat kepemilikan transportasi pribadi semakin menumpuk. Kecenderungan menggunakan transportasi pribadi tersebut disebabkan oleh asumsi masyarakat yang menganggap transportasi pribadi lebih aman daripada menggunakan transportasi umum. Selain itu, transportasi umum yang belum mampu menjangkau daerah-daerah tertentu juga menyebabkan masyarakat cenderung memilih menggunakan moda transportasi pribadi.

Peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi pastinya memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat. Salah satu dampaknya adalah mempengaruhi pertumbuhan aktivitas masyarakat pada tempat-tempat tertentu, misalnya pada area wisata dan perdagangan. Hal tersebut dikarenakan para pemilik kendaraan pribadi pastinya memerlukan area parkir untuk memarkirkan kendaraannya. Kebutuhan akan area parkir tersebutlah yang menjadi salah satu penyebab masalah di masyarakat, terbatasnya ruang parkir yang tersedia dibandingkan jumlah kendaraan yang ada dapat digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut didapat ketika mereka menjadi juru parkir. Namun, adanya juru parkir tersebut justru menimbulkan pendapat setuju dan tidak setuju di masyarakat karena terkadang banyak juru parkir yang nakal dengan mengambil keuntungan yang lebih pada masyarakat. Banyak masyarakat justru merasa di palak karena banyak juru parkir yang meminta bayaran padahal pada tempat tersebut sudah tertulis gratis biaya parkir. Selain itu, banyak pula juru parkir yang mematok tarif parkirnya dengan harga yang cukup mahal.

Permasalahan parkir ilegal telah marak terjadi di Kota Surabaya, padahal pemerintah kota Surabaya sendiri sudah mengeluarkan Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 mengenai penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya. Pada Perda tersebut dijelaskan bahwa juru parkir merupakan pihak yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk mengatur area parkir di tepi jalan umum. Namun, pada kenyataannya masih banyak penyelenggara parkir yang ilegal utamanya pada tempat-tempat seperti apotek, minimarket, dan tempat-tempat pinggir jalan lainnya. Penarikan biaya parkir oleh penyelenggara parkir ilegal tersebut dapat disebut sebagai pungutan liar atau biasa dikenal dengan pungli. Menurut Sonatra, Novianto, dan Riewanto (2019), pungutan liar adalah aktivitas meminta sesuatu (uang dan sebagainya) kepada seseorang atau lembaga tanpa mengikuti peraturan yang berlaku. Menurut Isnawan (2022), parkir liar dikategorikan sebagai pungli apabila dilihat dari perspektif pelakunya, yaitu apabila pelakunya melakukan pelayanan kepada masyarakat dan berharap mendapatkan imbalan.² Sedangkan menurut Hidayatullah (2023), para pelaku parkir liar yang menyelenggarakan parkir tanpa persetujuan pemilik tempat dapat dikatan sebagai pungutan liar.

Pada beberapa penelitian terdahulu telah banyak mengungkap persoalan mengenai pungutan liar oleh parkir ilegal yang terjadi di Kota Surabaya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Tranggono (2023) menjelaskan mengenai ketidaksetujuan masyarakat membayar parkir pada area supermarket, sedangkan penelitian Luqman Eko Susanto (2018) menjelaskan mengenai permasalahan dan juga hambatan pada implementasi Perda Kota Surabaya No. 8 Tahun 2012.³ Valda Pramudita Erviani (2023) mengkaji mengenai dampak pungutan liar yang diselenggarakan oleh parkir ilegal di Kota Surabaya, sedangkan Ananta Pratama (2023) mengkaji mengenai hasil dari implementasi Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018. Sama seperti sebelumnya, Bunga Putri Islam (2023) juga mengkaji mengenai implementasi Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018. Selanjutnya, pada penelitian ini kebaruan yang akan diteliti adalah mengenai persepsi masyarakat mengenai pungutan liar dan juga penerapan regulasi hukum atas kasus pungutan liar oleh penyelenggara parkir ilegal tersebut. Selain itu, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk memberitahu

¹ Okta Syahdia Jaelani et al., "Pelanggaran Hukum Retribusi Parkir dalam Praktik Pungutan Parkir Ilegal di Indomaret Rungkut Surabaya" 1 (2023).

² Luqman Eko Susanto, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA KOTA SURABAYA NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM," *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 4, no. 1 (March 29, 2018), <https://doi.org/10.30996/jpap.v4i1.1270>.

³ Valda Pramudita Erviani, Diana Nur Febriani, and Putri Kharisma, "Analisis Retribusi Layanan Parkir Minimarket Implementasi Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018" 1, no. 2 (n.d.).

masyarakat dan pemerintah agar lebih bijak dalam menganggapi masalah pungutan liar oleh penyelenggara parkir ilegal. Hal ini juga bertujuan agar terwujudnya lingkungan kota yang lebih baik dan juga tertata.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini memilih menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu yang mendefinisikan penelitian ini yang bertujuan untuk memahami sebuah fenomena yang dirasakan oleh subjek penelitian. Pada penelitian ini, data yang kami peroleh berasal dari studi literatur pada penelitian terdahulu. Subjek dari penelitian ini adalah penyelenggara parkir ilegal di Kota Surabaya dan objek nya adalah analisis penerapan regulasi hukum terhadap pungutan liar menurut masyarakat, penyelenggara parkir ilegal, dan juga pemerintah. Data sekunder dipilih pada penelitian ini, yaitu menggunakan data yang sudah ada pada jurnal atau artikel yang telah diterbitkan sebelumnya. Lokasi penelitian ini adalah berada di Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya. Alasan pemilihan lokasi ini sebagai tempat penelitian dikarenakan padatnya masyarakat pada area ini, terlebih lagi terdapat banyak area supermarket namun belum dilengkapi dengan lahan parkir yang memadai.

Pada penelitian ini menggunakan dua teori yaitu teori interaksi simbolik dan juga teori struktural fungsional. Teori interaksi simbolik dikemukakan oleh George Herbert Mead yang mengkaji mengenai makna simbolik dibalik interaksi sosial masyarakat dan bagaimana makna tersebut dapat membentuk perilaku suatu masyarakat. Pada penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk mengkaji persepsi masyarakat Kota Surabaya terhadap praktik pungutan liar oleh penyelenggara parkir ilegal dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi respon masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Sedangkan teori struktural fungsional dikemukakan oleh Talcott Parsons yang mengkaji mengenai bagaimana struktur sosial dan fungsi-fungsi sosial saling berkaitan demi menjaga keseimbangan masyarakat. Sehingga, pada penelitian ini teori tersebut membantu dalam mengkaji peran regulasi hukum dalam memelihara keseimbangan dan ketertiban sosial terkait kasus pungutan liar oleh penyelenggara parkir ilegal di Kota Surabaya.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Umum Pungutan Liar

Pungutan liar adalah Tindakan meminta sesuatu dari orang lain yang dilakukan dengan cara memaksa. Dalam tindakannya, pungutan liar dikatakan melanggar hukum karena dilakukan tanpa persetujuan pihak lain dan tanpa ada aturan yang mendasarinya. Pungutan liar juga dikatakan sebagai tindak pidana pemerasan, hal tersebut dikarenakan seseorang diancam dan dipaksa untuk memberikan sesuatu miliknya yang akan digunakan untuk memperkaya pihak yang meminta pungutan liar tersebut.⁴ Jadi, dapat disimpulkan pungutan liar bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan keuntungan tersebut hanya dinikmati oleh satu individu saja.

Praktik pungutan liar di Kota Surabaya sudah cukup menjamur. Banyak oknum-oknum nakal yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk semakin memperkaya dirinya sendiri. Tidak hanya di supermarket saja, bahkan di pinggir-pinggir jalan juga sudah banyak oknum yang melakukan pungutan liar. Terkadang, mereka melakukan hal tersebut dengan berkedok telah menjaga kendaraan kita agar tidak dicuri atau tekah membantu kita ketika memarkirkan kendaraan. Padahal pada kenyataannya mereka tidak membantu apa-apa, namun ketika kita akan pergi mereka malah meminta upah sebagai ganti telah menjaga kendaraan kita. Tentu saja jika dibiarkan lama kelamaan kondisi tersebut akan mengganggu masyarakat dan semakin meresahkan.

2. Tinjauan Umum Parkir Ilegal

Parkir ilegal atau bias akita kenal dengan sebutan parkir liar adalah kondisi dimana parkir yang muncul secara tiba-tiba dan tidak resmi yang menggunakan lahan dan mengakuisinya secara sepihak. Hal ini dikatakan ilegal karena tidak berada pada naungan pemerintah ataupun pihak terkait dan dana yang didapatkannya juga tidak akan masuk pada kas pemerintah. Biasanya, parkir ilegal diselenggarakan oleh

⁴ Drs Ananta Pratama et al., "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2018 DALAM MENGATASI PARKIR LIAR DI KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA," 2018.

oknum-oknum nakal yang memanfaatkan kekurangan sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan.

Parkir ilegal banyak ditemui pada tempat-tempat yang biasanya banyak dikunjungi namun tidak memiliki lahan parkir yang cukup. Misalnya saja pada supermarket, apotek, rumah makan, tempat fotocopy, dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui saja di area Ketintang sangat banyak tempat-tempat yang dijadikan sebagai parkir ilegal, padahal di tempat tersebut telah dituliskan bebas biaya parkir. Tak hanya di tempat perbelanjaan dan sebagainya, parkir ilegal juga sudah banyak menggunakan bahu jalan sebagai lahan parkirnya. Bahu jalan sendiri tidak diperkenankan untuk dijadikan lahan parkir karena tentunya hal tersebut dapat mengganggu lalu lintas, namun justru para juru parkir ilegal menjadikan tempat tersebut untuk memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri.

Secara resmi sebenarnya peraturan perparkiran di Kota Surabaya telah diatur pada Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018. Pada peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa juru parkir seharusnya adalah orang yang ditunjuk langsung oleh Dinas Perhubungan setempat. Dana yang didapatkan dari parkir legal tersebut selanjutnya akan masuk pada kas pemerintahan daerah setempat. Selain permasalahan tempat parkir, permasalahan tarif parkir juga cukup banyak menjadi perbincangan di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan oknum-oknum nakal biasanya menaikkan tarif parkirnya, padahal sebenarnya besaran tarif parkir juga sudah diatur oleh pemerintah daerah setempat. Pemerintah Kota Surabaya memiliki peraturan mengenai tarif parkir pada Perwali No. 29 Tahun 2018.

3. Implementasi Penegakan Hukum terhadap Kasus Pungutan Liar oleh Penyelenggara Parkir Ilegal

Kewenangan daerah untuk dapat menentukan dan menjalankan peraturan perundang-undangannya sendiri memiliki salah satu syarat yaitu dengan memiliki otonomi atau pendapatan asli daerah itu sendiri. Pendapatan asli tersebut dapat diperoleh melalui keuntungan dari pajak dokumen daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan dari sumber-sumber lain. Otonomi tersebut termasuk dalam sumbangsih dana kepada daerah setempatnya.

Pajak asli daerah atau PAD retribusi sampai saat ini masih menjadi penyumbang terbesar pada sumber dana daerah. Hal tersebut salah satunya diperoleh dari pendapatan pajak parkir setempat. Di Kota Surabaya sendiri yang dikenal sebagai Kota Pahlawan pastinya memiliki pesona tersendiri bagi pengunjung yang datang ke Kota Surabaya. Selain itu, padatnya penduduk Kota Surabaya juga menjadi salah satu penyumbang besar pada pajak parkir. Banyaknya populasi penduduk dan pendatang tersebut membuat kendaraan juga semakin bertambah banyak. Sehingga, kebutuhan akan lahan parkir juga semakin bertambah. Apabila pemerintah berhasil dalam mengelola parkir kendaraan tersebut ke dalam parkir legal pastinya pemerintah Kota Surabaya akan mendapat banyak keuntungan dari pajak parkir tersebut. Namun, pada implementasinya akhir-akhir ini banyak masyarakat yang mengeluhkan mengenai parkir ilegal. Banyak supermarket dan pusat perbelanjaan lainnya yang harusnya menjadi tempat yang gratis parkir justru dikuasai oleh para juru parkir ilegal. Tarif parkir yang juga cukup mahal juga menjadi keluhan masyarakat, karena terkadang dalam berbelanja masyarakat tidak butuh waktu yang lama, namun ketika mereka pergi harus membayar parkir. Tidak hanya itu, terkadang masyarakat tidak hanya berbelanja pada satu tempat melainkan bisa pada dua sampai tiga tempat. Tentunya apabila setiap berpindah tempat kita perlu membayar parkir kembali itu cukup menguras pengeluaran dan membuat masyarakat semakin resah.

Dalam mengatasi masalah perparkiran yang ada di Kota Surabaya sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018. Namun, dalam pengimplementasiannya sukses atau tidaknya peraturan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :

1. Komunikasi

Proses komunikasi yang baik sangat mempengaruhi keberhasilan peraturan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan jika ingin mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan peraturan harus diimbangi pula dengan proses komunikasi yang baik kepada masyarakat. Proses komunikasi yang dimaksud adalah dengan memberikan informasi dan layanan informasi secara tepat dan akurat kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat setempat tau dan dapat melaksanakan peraturan tersebut dengan baik.

Dalam pelaksanaan aspek komunikasi ini, ada 3 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan tersebut. Faktor pertama adalah faktor transmisi, pada faktor ini menjelaskan mengenai proses komunikasi agar berjalan lancar dan tidak terjadi miskomunikasi. Biasanya, Dinas Perhubungan akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai wujud keberhasilan faktor ini. Selain itu, juga

sebagai upaya agar tidak terjadi miskomunikasi pada masyarakat. Faktor yang kedua adalah faktor kejelasan. Faktor ini memberikan artian bahwa peraturan yang diterapkan harus jelas dan tidak bersifat ambigu bagi masyarakat. Pada implementasinya pihak terkait seharusnya memberikan pemberdayaan secara langsung kepada juru parkir liar. Selain itu, dengan pemberdayaan langsung komunikasi secara dua arah akan terjalin, sehingga antara kedua belah pihak diharapkan dapat saling memahami. Tidak hanya itu, dengan pemberdayaan secara langsung pihak terkait diharapkan juga dapat membantu dalam penyelesaian masalah parkir illegal. Faktor yang terakhir adalah faktor konsistensi. Faktor ini sangat penting pada pengimplementasian peraturan, karena konsistensi berarti jelas dan akan tetap dan terus berjalan. Pemerintah Kota Surabaya sebelumnya pernah mendapatkan ujaran kebencian pada sosial medianya mengenai permasalahan parkir ini, namun dengan konsistensinya Pemerintah Kota Surabaya tidak henti-hentinya terus menyuarakan mengenai peraturan ini. Pemerintah berharap dengan konsistensinya memberikan sosialisasi secara berkala informasi tersebut lambat laun akan diterima oleh masyarakat. Sesuai dengan penjelasan di atas, komunikasi merupakan salah satu hal yang penting dalam pengimplementasian Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018. Dengan komunikasi diharapkan masyarakat dapat mengetahui mengenai peraturan ini dan dapat melaksanakan peraturan ini dengan baik pula. Sehingga, permasalahan parkir di Kota Surabaya, khususnya pada Ketintang dapat teratasi dengan baik.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang memadai juga menjadi syarat keberhasilan dalam pengimplementasian peraturan. Beberapa sumber daya yang diperlukan dalam pengimplementasian peraturan yaitu meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya prasarana.⁵ Kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan pada pengimplementasian peraturan ini, hal tersebut karena sumber daya manusia bertugas sebagai pengimplementor kebijakan tersebut agar berjalan secara maksimal. Selanjutnya, sumber daya anggaran juga digunakan sebagai penunjang implementasi peraturan. Sumber daya anggaran berfungsi sebagai peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelayanan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Yang terakhir adalah sumber daya prasarana. Dalam memenuhi kebutuhan parkir yang semakin bertambah, pemerintah terkait juga memerlukan tambahan area parkir yang memadai. Selanjutnya, area parkir masih banyak ditemukan berada di pinggir-pinggir jalan. Tentu saja hal tersebut sebenarnya tidak baik, selain mengganggu jalan juga mengganggu para pejalan kaki yang memerlukan bahu jalan tersebut.

Pada pengimplementasiannya, pemerintah Kota Surabaya memiliki sumber daya manusia dan anggarannya yang cukup. Hal tersebut dibuktikan dengan Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang telah memiliki beberapa tim untuk menuntaskan permasalahan parkir illegal tersebut. Beberapa tim tersebut diantaranya tim walet, tim patrol, tim sosial media, dan tim pelapora serta administrasi. Sebenarnya jumlah tersebut belum bisa dikatakan banyak dibandingkan dengan banyaknya penduduk Kota Surabaya, namun untuk sekarang dengan tim tersebut telah memadai untuk mengatur permasalahan parkir di Surabaya.

Sumber daya anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebenarnya mencukupi untuk mengimplementasikan peraturan tersebut. Namun, dari tahun ke tahun jumlah anggaran tersebut terus menurun. Selain itu, pengalokasian oleh pihak terkait yang kurang efektif membuat pengimplementasian peraturan tersebut juga sedikit terhambat. Di Ketintang sendiri, anggaran prasarana masih sangat terbatas. Akses jalan yang sempit dan tidak memiliki bahu jalan, ditambah pertokoan yang tidak memiliki halaman membuat parkir liar semakin marak terjadi. Hal tersebut tentunya juga sangat mengganggu lalu lintas hingga tak jarang menjadi sumber kemacetan.

3. Sikap Pelaksana

Sikap yang ditunjukkan oleh pelaksana dalam pelaksanaan peraturan juga menjadi faktor penting dari pengimplementasian peraturan tersebut. Apabila para pelaksana menunjukkan kebijakan sikap baik dan mendukung kebijakan tersebut, maka masyarakat akan dengan senang hati melaksanakan peraturan tersebut juga. Hal tersebut juga terjadi sebaliknya, apabila pelaksana kebijakan tidak menunjukkan sikap baik dan terkesan menolak melaksanakan peraturan tersebut, maka masyarakat juga akan enggan untuk melaksanakan peraturan tersebut.

Karakter pelaksana kebijakan juga menjadi kunci dalam kesuksesan pelaksanaan implementasi peraturan. Hal tersebut bersangkutan terhadap target atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila pelaksana kebijakan tidak memiliki karakter yang baik, target pastinya akan menolak dan enggan menjalankan peraturan tersebut. Namun sebaliknya, jika pelaksana kebijakan memiliki karakter

⁵ Bunga Putri Islam, "PENERAPAN SANKSI JURU PARKIR LIAR ATAS PUNGUTAN TARIF PARKIR MINIMARKET DI KOTA SURABAYA," *Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 2023, 1-11.

yang baik, utamanya sabar dalam memberikan penjelasan mengenai peraturan terkait, pastinya masyarakat juga akan menerima dengan baik peraturan tersebut.

Di Ketintang sendiri, implementasi peraturan tersebut masih belum terlihat adanya. Belum ada pelaksana kebijakan yang terlihat memberikan sosialisasi kepada para juru parkir liar. Belum terlihat pula tindakan langsung yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan parkir ilegal di wilayah Ketintang. Justru beberapa bulan terakhir ini semakin banyak juru parkir liar, padahal pada tempat tersebut sudah jelas-jelas tertulis area gratis parkir. Seharusnya, peraturan tersebut diikuti oleh komitmen oleh pelaksana kebijakannya. Sehingga, pelaksana kebijakan sendiri dapat menunjukkan sikap pelaksanaannya dengan baik dan masyarakat yang melihat itu kemudian dapat terketuk hatinya untuk turut mengimplementasikan peraturan tersebut. Namun, jika terus menerus tidak terlihat tindakan para pelaksana kebijakan, maka permasalahan parkir ini juga tidak akan segera teratasi. Justru permasalahan parkir ini akan semakin merajalela dan peraturan yang telah dibuat tersebut akan terabaikan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan tata susunan atau tingkat jabatan yang terbagi berdasarkan kewajiban dan wewenang yang dimilikinya pada suatu instansi. Struktur birokrasi tersebut sangat penting dalam berjalannya suatu instansi, hal tersebut dikarenakan supaya tercipta lingkungan yang saling terkait dan saling menghormati pada suatu instansi. Selain itu, struktur birokrasi juga berguna untuk meningkatkan tanggung jawab setiap anggotanya, karena setiap anggota telah memiliki jabatan dan kewajibannya masing-masing.

Dalam konteks pengimplementasian Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018, struktur birokrasi diperlukan dalam melakukan pelayanan publik. Pembuatan struktur birokrasi tersebut diharapkan pemerintah terkait dapat mengakomodasi masyarakat dengan maksimal. Tidak hanya itu, dengan adanya struktur birokrasi diharapkan pemerintah terkait dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dan tanpa terkecuali. Lembaga pelayanan yang berorientasi pada masyarakat seharusnya dapat memenuhi fasilitas dan menjawab semua permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat, termasuk keluhan akan permasalahan parkir.

Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebenarnya telah memiliki struktur birokrasi yang baik dan tertata. Hal tersebut dibuktikan dengan tim yang memang sudah terbentuk yang bertugas untuk mengatasi permasalahan parkir di Kota Surabaya. Namun, pada pengimplementasiannya struktur birokrasi tersebut belum berjalan dengan maksimal. Mungkin, salah satu penyebabnya adalah karena jumlah tim yang kurang seimbang dengan jumlah penduduk Kota Surabaya. Apalagi pada area Ketintang, tidak hanya penduduk yang banyak melainkan juga para pendatang. Di Ketintang sendiri banyak sekali mahasiswa rantau yang berkuliah di UNESA atau IT TELKOM. Hal tersebutlah yang juga mempengaruhi bertambahnya permasalahan parkir di wilayah Ketintang.

4. Hambatan dalam Implementasi

Dalam mengimplementasikan Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018, pada beberapa indikator telah berjalan dengan baik. Namun, tak dipungkiri juga dalam pengimplementasiannya juga banyak mengalami hambatan. Beberapa hambatan tersebut diantaranya :

1. Kurangnya keberadaan sumber daya.

Di Ketintang sendiri semua beberapa aspek sumber daya yang dibutuhkan memang belum terpenuhi. Misalnya saja sumber daya manusianya, di Ketintang masih banyak sekali juru parkir liar namun tidak ada sama sekali dari pihak terkait yang menertibkan hal tersebut. Bahkan, dari waktu ke waktu semakin bertambah banyak. Selain itu, sumber daya prasarana juga sangat kurang memadai di daerah Ketintang ini. Jalannya yang sempit di tambah lagi pertokoan yang terletak mepet dengan jalan semakin memperparah kasus parkir liar di Ketintang ini.

2. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Persepsi masyarakat akan parkir ilegal membuat permasalahan parkir ini terkadang dipandang sebelah mata. Kurang adanya Tindakan tegas dari pihak terkait juga membuat masyarakat menjadi abai akan kasus tersebut. Padahal sebenarnya, apabila kasus ini sedikit demi sedikit diatasi mungkin juga akan memperbaiki kasus lainnya yang ada di Ketintang, misalnya kemacetan. Tidak hanya itu, karena tidak adanya contoh pengimplementasian secara langsung oleh pembuat kebijakan juga mempengaruhi persepsi masyarakat untuk mengimplementasikan peraturan tersebut. Tidak adanya sanksi tegas yang diberikan juga membuat masyarakat tidak jera dan terus mengulangi kesalahan yang sama.

3. Belum maksimalnya teknologi dalam mengatasi parkir liar.

Kemajuan teknologi seharusnya mampu membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan parkir di masyarakat.⁶ Salah satu hal yang dapat diterapkan ada dengan pemasangan CCTV pada area-area tertentu yang biasa dijadikan kawasan parkir illegal. Diharapkan dengan CCTV tersebut pemerintah dapat mengawasi apa yang terjadi pada area tersebut. Sehingga, pemerintah dapat menyiapkan Tindakan atau solusi untuk membuabarkan parkir illegal tersebut.

4. Tersebar nya informasi terlebih dahulu mengenai razia.

Razia parkir illegal sebenarnya sudah sering dilakukan. Namun, terkadang informasi akan diadakannya razia tersebut tersebar terlebih dahulu. Sehingga, para juru parkir liar sudah bersembunyi atau memilih libur hari itu. Hal tersebutlah yang kemudian membuat gagalnya pengimplementasian peraturan tersebut.

5. Persepsi Masyarakat Kel. Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya terhadap Parkir Illegal dan Regulasi Hukumnya

Dalam kehidupan sehari-hari, permasalahan parkir illegal menuai pemikiran pro dan kontra di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan perbedaan kepentingan dan asumsi masyarakat terhadap parkir illegal tersebut. Bagi sebagian masyarakat menilai bahwa parkir illegal tidak sepenuhnya patut disalahkan. Banyak masyarakat justru berempati ataupun berterimakasih kepada juru parkir liar. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti :

1. Timbulnya rasa iba.

Terkadang banyak di beberapa tempat yang menjadi juru parkir justru orang yang sudah berumur, bahkan bisa dikatakan sudah renta. Namun, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya biasanya orang-orang tersebut terpaksa harus bekerja demi bisa membeli kebutuhan hidupnya. Hal tersebut lah yang kemudian mendorong munculnya rasa iba pada masyarakat. Walaupun tidak membantu tapi mereka dengan senang hati tetap memberikan sejumlah uangnya kepada juru parkir liar tersebut. Sebenarnya, dari segi sosial hal tersebut dinilai sangat baik bahkan perlu ditanamkan pada diri kita, namun apabila ditinjau dari segi hukum juru parkir liar tetaplah salah. Selain dapat merugikan orang lain, hal tersebut juga menyalahi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Surabaya pada Perda No. 3 Tahun 2018.

2. Menjaga kendaraan yang mereka miliki.

Tidak hanya karena rasa iba, banyak pula masyarakat yang mentolerir adanya parkir illegal dikarenakan mereka merasa dengan adanya juru parkir liar tersebut motor yang mereka miliki menjadi aman. Memang benar, dengan maraknya kasus pencurian motor yang banyak terjadi di Kota Surabaya membuat masyarakat was-was terhadap kendaraan yang mereka miliki. Oleh karena itu, terkadang masyarakat rela menyisihkan uangnya untuk membayar parkir daripada mereka harus cemas akan kehilangan motor mereka.

Namun, dalam kehidupan sehari-hari juga banyak pula masyarakat yang tidak setuju bahkan merasa terganggu dengan adanya parkir illegal tersebut. Hal tersebut dikarenakan banyaknya juru parkir yang nakal, mereka hanya mengambil keuntungan dari parkir namun tidak membantu dalam parkir. Terkadang, ketika kita berbelanja ke supermarket, ketika datang belum ada juru parkir yang berada pada tempat tersebut. Namun, ketika akan keluar juru parkir datang dan mereka meminta upah kepada kita. Pasti hal tersebut sangat menjengkelkan bagi sebagian masyarakat, karena keberadaan mereka yang tiba-tiba muncul dan dinilai tidak membantu kita dalam menjaga kendaraan. Selain itu, pematokan tarid parkir yang mahal dan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah juga dinilai masyarakat sebagai pungutan liar. Hal tersebut dikarenakan dana parkir tersebut hanya didapatkan untuk keuntungan individu sendiri. Padahal apabila pada parkir legal atau resmi, sebagian dana parkir tersebut akan masuk dalam kas pemerintah daerah setempat. Di Ketintang sendiri, permasalahan parkir ini juga masih banyak dikeluhkan, bahkan dari waktu ke waktu semakin banyak. Namun, ditinjau dari keberadaan parkir illegal yang semakin banyak, sepertinya belum ada tindakan tegas dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai kesuksesan dalam pengimplementasian regulasi hukum terhadap pungutan liar oleh penyelenggara parkir illegal dipengaruhi

⁶ Mohammad Riyan Hidayatulloh, "PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PUNGUTAN LIAR OLEH PENYELENGGARA PARKIR ILEGAL," *JURNAL LEGISIA* 15, no. 1 (January 31, 2023): 36-49, <https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.250>.

oleh beberapa faktor, diantaranya komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan birokrasi. Ditinjau dari beberapa faktor sebenarnya Kota Surabaya harusnya sudah mampu dalam mengimplementasikan peraturan tersebut dengan baik. Namun, pada kenyataannya sumber daya yang dimiliki masih belum sebanding dengan jumlah penduduk Kota Surabaya. Dalam implementasinya, Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 juga mengalami banyak hambatan lain. Kurangnya kesadaran dari setiap masyarakat masih menjadi faktor utama penghambat implementasi peraturan tersebut. Perbedaan persepsi masyarakat terhadap adanya parkir illegal juga membuat juru parkir illegal semakin menjamur. Kedepannya, pemerintah dan pihak yang terkait harus lebih tegas terhadap implementasi Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018. Hal tersebut sebagai upaya untuk menertibkan masyarakat dan mewujudkan Kota Surabaya yang lebih baik dan tertata.

Daftar Pustaka

- Erviani, Valda Pramudita, Diana Nur Febriani, and Putri Kharisma. "ANALISIS RETRIBUSI LAYANAN PARKIR MINIMARKET IMPLEMENTASI PERDA KOTA SURABAYA NO. 3 TAHUN 2018" 1, no. 2 (n.d.).
- Islam, Bunga Putri. "PENERAPAN SANKSI JURU PARKIR LIAR ATAS PUNGUTAN TARIF PARKIR MINIMARKET DI KOTA SURABAYA." *Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 2023, 1-11.
- Jaelani, Okta Syahdia, Salsabilla Ilmi Romadhoni, Resta Feby Arini, Shavira Yumna, Adinda Tania Wijaya, and Adinda Faiziah. "Pelanggaran Hukum Retribusi Parkir dalam Praktik Pungutan Parkir Ilegal di Indomaret Rungkut Surabaya" 1 (2023).
- Mohammad Riyan Hidayatulloh. "PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PUNGUTAN LIAR OLEH PENYELENGGARA PARKIR ILEGAL." *JURNAL LEGISIA* 15, no. 1 (January 31, 2023): 36-49. <https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.250>.
- Pratama, Drs Ananta, M Si, Fadllal Alimi, Muhammad Alfian Prasetyo, Adevansyah Wika, Mulia Nanda, and Aryan Adi Pangestu. "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2018 DALAM MENGATASI PARKIR LIAR DI KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA," 2018.
- Susanto, Luqman Eko. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA KOTA SURABAYA NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM." *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 4, no. 1 (March 29, 2018). <https://doi.org/10.30996/jpap.v4i1.1270>.